

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBARENGAN TINDAK  
PIDANA DI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA  
DI INDONESIA**

**TESIS**

Oleh :

**BONNI ALIM HIDAYAT  
201620251001**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
JAKARTA  
2018**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : **Tinjauan Yuridis Terhadap Perbarengan Tindak Pidana/ Cosursus Realis Di Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia**

Nama Mahasiswa : Bonni Alim Hidayat

Nomor Pokok Mahasiswa : 201620251001

Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum/ Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

Jakarta, Juli 2018

MENYETUJUI:

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH  
NIDN : 0319046403

Dr. Ir. H.M. Hanafi Darwis, SH., MM  
NIDN : 0323015604

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Tesis : **Tinjauan Yuridis Terhadap Perbarengan Tindak Pidana/ Cosursus Realis Di Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia**

Nama Mahasiswa : Bonni Alim Hidayat

Nomor Pokok Mahasiswa : 201620251001

Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum/ Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 24 Juli 2018

Jakarta, Juli 2018

Mengesahkan,

Ketua Tim Penguji : Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH

NIDN : 0319046403

Penguji I : Dr. Yurnal, SH., M.Hum

NIDN : 0714125801

Penguji II : Dr. Hotma P. Sibuea, SH., MH

NIDN : 0323035802

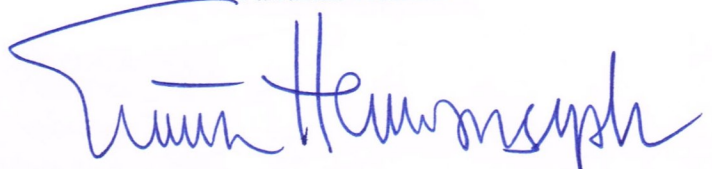
MENGETAHUI,

Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum



Dr. Dwi Atmoko, SH., MH  
NIP: 1801313

Dekan  
Fakultas Hukum



Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH  
NIP: 1804338

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Tesis Yang Berjudul

**Tinjauan Yuridis Terhadap Perbarengan Tindak Pidana/ *Cosursus Realis* Di Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.**

Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan tesis ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan ijin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan tesis ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Jakarta, Juli 2018

Yang Membuat Pernyataan,



Bonni Alim Hidayat  
201620251001



## ABSTRAK

Bahwa dalam pemberlakuan atau penerapan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal tersebut ternyata telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-2 (dua) Pasal 28 H Ayat (2). Pasal tersebut bersifat mandul dan tidak dapat diterapkan serta dilaksanakan secara tegas dan konsekwen bagi aparaturnya penegak hukum. Bahwa ketentuan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah bertentangan dan tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Karena pada intinya Pasal 65 Ayat (1) KUHP menegaskan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis maka dijatuhkan hanya satu pidana. Akan tetapi banyak kasus yang ditemukan tentang perbarengan perbuatan sebagaimana tersebut di dalam Pasal 65 ayat (1) KUHP tidak pernah diterapkan oleh Majelis Hakim serta aparaturnya penegak hukum lainnya. Hal inilah yang merupakan masalah krusial serta perlu dipecahkan bersama. Oleh karena itu perlu adanya Yudisial Review atau Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan oleh peneliti sendiri sebagai key instrument, Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara; (1) wawancara mendalam; (2) observasi; dan (3) dokumentasi. Untuk analisis data menggunakan teknik deskriptif. Dengan hasil akhir bahwa Pasal 65 KUHP (Concursus Realis / Perbarengan tindak pidana) tidak bisa dilaksanakan sepenuhnya terutama oleh aparaturnya penegak hukum dan bahkan bertentangan dengan Pasal 272 KUHAP.

**Kata Kunci : Tinjauan Yuridis Terhadap Perbarengan Tindak Pidana / Concursus Realis Di Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia**

## **ABSTRACT**

*That in the enactment or application of Article 272 of Law Number 8 Year 1981 concerning the Criminal Procedure Code (KUHP). The Article has proven to be contradictory to the provisions of Article 65 of Law Number 1 Year 1946 concerning the Criminal Code (KUHP) and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Second Amendment (two) Article 28 H Paragraph (2) . The article is barren and can not be applied and implemented explicitly and consistently for the law enforcement apparatus. Whereas the provision of Article 272 of Law Number 1 Year 1946 concerning the Criminal Procedure Code (KUHP) has been contradictory and inconsistent with the provision of Article 65 of Law Number 8 Year 1981 concerning the Criminal Code (Criminal Code), Because essentially Article 65 Paragraph (1) of the Criminal Code affirms in the case of several incidents of deeds which shall be regarded as stand-alone acts so as to constitute some crimes, which are threatened with the same principal punishment shall be imposed only one criminal. However, many cases are found about the incidence of acts as mentioned in Article 65 paragraph (1) of the Criminal Code never applied by the Panel of Judges and other law enforcement apparatus. This is a crucial problem and needs to be solved together. Therefore the need for Judicial Review or Testing of Law Number 1 Year 1946 About the Book of Criminal Law (KUHP). The approach used in this study is a qualitative approach. Data collection is carried out by the researcher himself as a key instrument, data collection techniques are carried out in a way; (1) in-depth interviews; (2) observation; and (3) documentation. For data analysis using descriptive techniques. With the final result that Article 65 of the Criminal Code (Realist Concourse / Perbarengan crime) cannot be fully implemented especially by law enforcement officials and even contradicts Article 272 of the Criminal Procedure Code.*

***Keywords: Juridical Review Against Conflict of Real Criminal / Concursum In Criminal Justice System In Indonesia***

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBARENGAN TINDAK PIDANA/ *CONCURSUS REALIS* DI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA”** dengan baik dan lancar. Penulisan Tesis hukum ini diajukan untuk memenuhi tugas-tugas dan memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Studi Strata II (S-2) di Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan seperti yang diharapkan, oleh karenanya kritik atau saran yang membangun selalu penulis harapkan. Kiranya keberhasilan ini tidak terlepas dari doa dan bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu untuk menyelesaikan Proposal Tesis ini kepada yang terhormat :

1. Yth. Bapak Inspektur Jenderal Polisi (p) Drs. Bambang Karsono., S.H, M.M, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Yth. Bapak Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Yth. Bapak Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Ir. H.M. Hanafi Darwis, S.Pd., M.M, selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan bagi penulis selama pembuatan Tesis.
4. Yth. Bapak dan Ibu Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah banyak memberikan bekal Akademik bagi penulis selama masa perkuliahan.

Bekasi, 06 Juli 2018

Bonni Alim Hidayat



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN TESIS.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PEGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	12
D. Kerangka Teori dan Bagan Teori.....	14
E. Metode Penelitian.....	26
F. Sistematika Penulisan .....	29
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Teori Jeremy Bentham.....	30
B. Pengertian Dasar Tentang Hukum.....	30
C. Hukum dan Keadilan .....	33
D. Hukum dan Kepastian.....	40
E. Hukum dan Kemanfaatan .....	45
<b>BAB III : TINJAUAN YURIDIS TENTANG PASAL 65 KUHP (CONCURSUS REALIS / PERBARENGAN TINDAK PIDANA) APAKAH DAPAT DILAKSANAKAN SEPENUHNYA DI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA</b>	
A. Pengertian Samenloop atau Perkataan Feit .....	52
B. Eendaadse Samenloop Atau Concursus Idealis.....	62



C. Meerdaadse Samenloop Atau Concursus Realis .....	92
<b>BAB IV : CARA MENGATASI ADANYA PERTENTANGAN PASAL 65 KUHP (CONCURSUS REALIS / PERBARENGAN TINDAK PIDANA) DENGAN PASAL 272 KUHP</b>	
A. Voortgezette Handeling Atau Tindakan Yang Berlanjut .....	113
B. Ketentuan Pidana Yang Bersifat Umum Dan Ketentuan Pidana yang Bersifat Khusus.....	123
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Simpulan .....	144
B. Saran .....	146
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>147</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

